

**ANALISIS AKTOR DALAM PENGELOLAAN
EKOWISATA MANGROVE LANTEBUNG
KELURAHAN BIRA KECAMATAN TAMALANREA
KOTA MAKASSAR**

Oleh :

MUHAMMAD ANDY KURNIAWAN

M 111 15 510



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Aktor dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove
Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota
Makassar
Nama : Muhammad Andy Kurniawan
Nomor Pokok : M 111 15 510

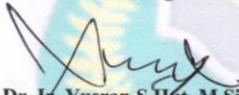
Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Kehutanan
Pada
Program Studi Kehutanan
Departemen Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut., M.Si., IPU
NIP. 19691206199603 1 004


Ir. Adravanti Sabar, S.Hut., MP., IPM.
NIK. 198509162018074001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Kehutanan
Departemen Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin


Dr. Forest Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

Tanggal Lulus : 31 Januari 2020

ABSTRAK

Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung kini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir. Pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung tidak terlepas dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat di sekitar kawasan ekowisata, untuk menunjang keberhasilan pengelolaan ekowisata mangrove. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui peran dan kepentingan setiap aktor dalam pengelolaan yang berada di kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung. Metode pengambilan data digunakan tiga tahap, yaitu: Metode *Snowball Samplin*, Triagulasi data dan Verifikasi data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*). Tahap analisis data penelitian ini: Identifikasi aktor dan perannya, analisis kepentingan para aktor serta pemetaan kepentingan dan pengaruh setiap Aktor. Hasil penelitian menunjukkan aktor yang terlibat yaitu Jekomala, Lurah Bira, Dinas Pariwisata Kota Makassar, Kelompok Nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, analisis kepentingan yang terdapat jalur hijau, *Biodiversity*, Pendidikan dan wisata. Pemetaan kepentingan dan pengaruh aktor *Keyplayers*: jekomala, Dinas Pariwisata Kota Makassar, *context Setter* : Dinas Kelautan dan Perikanan, Lurah Birah, *Subject* : Kelompok Nelayan Lantebung

Kata kunci: Aktor, peran dan kepentingan, mangrove

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Aktor dalam Pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar" guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut., M.Si., IPU.** Dan **Ir. Adrayanti Sabar, S.Hut., MP., IPM.** selaku dosen Pembimbing
2. **Dr. Ir. Ridwan, MSE.** Dan **Ir. Budi Aman, MP.** selaku dosen penguji, dan dosen di laboratorium.
3. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kehutanan beserta Bapak dan Ibu Staf Pegawai yang telah banyak memberikan pengetahuan, bantuan dan bimbingan.
4. Terima Kepada Laboratorium **Kebijakan dan Kewirahaan Kehutanan** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin dan
5. Teman-teman sehati Laboratorium kebijakan dan kewirahaan tanpa terkecuali, terkhusus teman seperjuangan **Ardian Halis, Heryanto S.Hut, Muhammad Arif Adhar, Rika Lestari S.Hut, Awuliya Pertiwi S.Hut** terima kasih atas bantuan, motivasi dan kebersamaannya.
6. Teman-teman "**Virbius15**" Forester **Unhas Angkatan 2015**, yang terkhusus **Fathul Anshari S.Hut, Amir Mahmud, Andi Muh. Fadli Putranto S.Hut, Anriana S.Hut, Muh. Ichsan Gifary S.Hut, Muh. Agung Tomasina, Karmila S.Hut** sama-sama berjuang di bangku perkuliahan terkhusus sampai selesai.
7. Terima kasih seluruh Anggota **Keluarga Mahasiswa Kehutanan Sylva Indonesia (PC.) Unhas** yang selama ini memberikan dukungan dan motivasi

8. Kepada teman – teman **Pengurus Badan Eksekutif Keluarga Mahasiswa Kehutanan Sylva Indonesia (PC.) Unhas Periode 2017/2018** yang telah bersama menyelesaikan periode kepengurusan selama satu tahun
9. Terima kasih kepada **Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Kehutanan Sylva Indonesia (PC.) Unhas Periode 2018/2019** yang telah bersama menyelesaikan periode kepengurusan selama satu tahun
10. Teman – teman seperjuangan **Himpunan Mahasiswa Islam (HmI)** terima kasih atas ruang pembelajarannya.
11. Terima Kasih Kepada Teman-teman **Kuliah Kerja Nyata Unhas Gelombang 99 Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru**
12. Terima kasih Kepada saudara **Muh. Ilham Wahyudi, Zulfikar Maulana Putra, Andi Nur Halim S.Pd** yang selama ini membantu dan memberikan motivasi

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga teruntuk kepada Ayahanda **H. Munadir Nurdin S.Sos** yang selalu melimpahkan kasih sayangnya, mengajarkan tentang pentingnya sebuah keluarga, etika, kesederhanaan dan ilmu agama, Ibunda saya **Hj. Haerani Bunna** yang selalu mengingatkanku untuk senantiasa menyayangi keluarga, berdoa dan bersyukur kepada Allah SWT dan yang selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan dan selalu memberikan dukungan untuk senantiasa bijak dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas segalanya, kalian tak akan luput dari doa yang kupanjatkan kepada-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi bahan informasi pengetahuan bagi pembaca sekalian.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 31 Januari 2020

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1. Hutan Mangrove	3
2.1.1 Defenisi Mangrove.....	3
2.1.2 Manfaat dan Fungsi Hutan Mangrove.....	4
2.2. Aktor Atau <i>Stakeholder</i>	5
2.2.1 Defenisi Aktor.....	5
2.2.2 <i>Stakeholder</i> Internal dan <i>Stakeholder</i> Eksternal	6
2.2.3 Aktor dalam formulasi kebijakan.....	7
2.2.4 Peran stakeholder	9
2.2.5 <i>Governance</i>	9
III METODE PENELITIAN.....	10
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	10
3.2. Alat dan Bahan.....	10
3.3. Metode Pengumpulan Data	10
3.4. Tahap Pengambilan Data	11
3.5 Jenis Data	11
3.6 Analisis Data.....	11

IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	14
4.1	Keadaan Umum.....	14
4.1.1	Letak Geografis dan Administrasi Daerah.....	14
4.1.2	Keadaan Demografi	14
4.2	Identifikasi Aktor dan Perannya.....	16
4.3	Analisis Kepentingan di Kawasan Ekosistem Mangrove Lantebung	19
4.4	Pemetaan Para Aktor dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung	23
V.	PENUTUP.....	27
5.1	Kesimpulan	27
5.2	Saran.....	28
	DAFTAR PUSTAKA	29
	LAMPIRAN.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kelurahan Bira	15
Tabel 2	Aktor Pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung	17
Tabel 3	Aktor dan Kepentingan	20
Tabel 4	Tabel Nilai Kepentingan	23
Tabel 5	Tabel Nilai Pengaruh	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Matriks Analisis Stakeholder.....	8
Gambar 2.	Pemetaan Para Aktor	15
Gambar 3.	Lokasi tempat Penelitian	28
Gambar 4	Pemetaan Pengaruh Kepentingan Setiap Aktor	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Hasil Pengelolaan Data	33
Lampiran 2.	Dokumentasi Kegiatan Penelitian	34
Lampiran 3.	Pedoman Wawancara	36

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kualitas serta berbagai variasi mangrove yang terbesar di dunia, (Giri et al., 2011). Sekitar 3 juta hektare hutan mangrove tumbuh di sepanjang 95.000 kilometer pesisir Indonesia, jumlah ini mewakili 23% dari total keseluruhan jumlah mangrove yang ada di dunia. Namun dalam tiga dekade terakhir, jumlah luas hutan mangrove di Indonesia mengalami penurunan mencapai 40% (FAO, 2007). Hal tersebut menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara dengan kerusakan mangrove terbesar (Campbell & Brown, 2015).

Provinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis pantai mencapai 1.937 km dan jumlah pulau 299 buah, merupakan habitat yang potensial bagi tumbuh dan berkembangnya ekosistem mangrove. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2014, luas mangrove di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 28.954,3 ha. Dari luasan tersebut hanya 5.238 ha yang masih dalam kategori baik, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak dan sangat rusak.

Kawasan Ekosistem Mangrove Kota Makassar pada tahun-tahun sebelumnya cukup memprihatinkan. Pada tahun 2001, luas mangrove hanya sekitar 50,30 ha dan pada tahun 2015 mengalami penambahan luas sebesar 58,53 ha atau bertambah sekitar 16% (Bando et al., 2017). Hal ini terjadi karena berbagai kegiatan konservasi dan penanaman mangrove di wilayah pesisir utara Kota Makassar telah dilakukan oleh berbagai pihak.

Kawasan Ekowisata Mangrove lantebung berada di pesisir utara Kota Makassar, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, dengan ditumbuhi pohon mangrove baik secara alami maupun yang ditanam oleh relawan dan pemerintah. Kawasan Ekowisata Mangrove lantebung kini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir (BPPD, 2015). Pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung tidak terlepas dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat di sekitar kawasan ekowisata, untuk menunjang keberhasilan pengelolaan ekowisata mangrove, maka dari itu perlu

analisis aktor untuk mengetahui pihak mana saja yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung.

Analisis aktor dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung. Aktor dan *stakeholder* sendiri merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari dua buah kata, yaitu “stake” dan “holder”. Secara umum, kata “stake” dapat diterjemahkan sebagai “kepentingan”, sedangkan kata “holder” dapat diartikan sebagai “pemegang”. Jadi seperti yang telah diungkapkan diatas, *stakeholder* artinya adalah pemegang kepentingan (Estaswara,2010). Hadirnya para aktor dalam pengelolaan kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung untuk memastikan apakah dalam pengelolaannya telah sesuai dengan Perpres No. 73 Tahun 2012. Untuk mensinergikan kebijakan dan program pengelolaan ekosistem mangrove yang meliputi bidang ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin fungsi dan manfaat ekosistem mangrove secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan hal di atas, perlu adanya penelitian analisis aktor untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dan memiliki kepentingan yang lebih, serta bagaimana peran setiap aktor dalam pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kepentingan setiap aktor dalam pengelolaan yang berada di kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung. Adapun kegunaan penelitian ini untuk memberikan informasi dan pengetahuan, informasi tersebut berupa pembangunan hutan mangrove khususnya kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung kepada mahasiswa, pemerintah, masyarakat lokal serta yang membutuhkan informasi tentang pengelolaan kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Mangrove

2.1.1 Defenisi Mangrove

Hutan mangrove sering disebut juga tumbuhan bakau berasal dari kata portugis *mangue* dan inggris *grove* (MacNae, 1968). Dalam bahasa inggris kata mangrove digunakan untuk tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut, sedangkan dalam bahasa portugis untuk menyatakan jenis individu tumbuhan (Onrizal, 2008).

Menurut (Harahab, 2010:27) hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis, dan merupakan komunitas yang hidup di dalam kawasan yang lembab dan belumpur serta dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove disebut juga sebagai hutan pantai, hutan payau atau hutan bakau. Pengertian hutan mangrove sebagai hutan pantai adalah pohon-pohonan yang tumbuh di daerah pantai (pesisir), baik daerah yang dipengaruhi pasang surut air laut maupun wilayah daratan pantai yang dipengaruhi oleh ekosistem pesisir. Sedangkan pengertian mangrove sebagai hutan payau atau hutan bakau adalah pohon-pohonan yang tumbuh di daerah 17 payau pada tanah aluvial atau pertemuan air laut dan air tawar di sekitar muara sungai.

Beberapa ahli mengemukakan definisi hutan mangrove, seperti (Soerianegara 1987 dalam M Khazali 2006) menyatakan bahwa hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pantai, biasanya terdapat di daerah teluk dan di muara sungai yang dicirikan oleh tidak terpengaruh iklim, dipengaruhi pasang surut, tanah tergenang air laut, tanah rendah pantai, hutan tidak mempunyai struktur tajuk, jenis-jenis pohonnya biasanya terdiri atas api-api (*Avicenia sp*), pedada (*Sonneratia*), bakau (*Rhizophora sp*), lacang (*Bruguiera sp*), nyirih (*Xylocarpus sp*), nipah (*Nypa sp*) dan lain-lain.

Ekosistem mangrove atau hutan bakau termasuk ekosistem pantai atau komunitas bahari dangkal yang sangat menarik, yang terdapat pada perairan tropik dan subtropik. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan ekosistem lainnya karena mempunyai vegetasi yang

agak seragam, serta mempunyai tajuk yang rata, tidak mempunyai lapisan tajuk dengan bentuk yang khas, dan selalu hijau (Irwan, 2010:135).

Hutan mangrove terdapat di sepanjang garis pantai di kawasan tropis, dan menjadi pendukung berbagai jasa ekosistem, termasuk produksi perikanan dan siklus unsur hara. Namun luas hutan mangrove telah mengalami penurunan sampai 30–50% dalam setengah abad terakhir ini, karena pembangunan daerah pesisir, perluasan pembangunan tambak dan penebangan yang berlebihan.

Banyak faktor yang mempengaruhi keberlangsungan hidup serta pertumbuhan mangrove, diantaranya mangrove biasa tumbuh dengan baik di habitat yang lembab dan berlumpur serta dipengaruhi oleh pasang surut, mangrove, biasanya tumbuh dengan baik pada substrat tanah atau pasir dengan tekstur halus seperti lumpur serta kaya humus dan sulfida (Kathiresan dan Thangam, 1990).

2.1.2 Manfaat dan Fungsi Hutan Mangrove

Secara ekologis, hutan mangrove berfungsi sebagai daerah pemijahan (*spawninggrounds*) dan daerah pembesaran (*nurserygrounds*) berbagai jenis ikan, udang, kerang-kerangan dan spesies lainnya. Selain itu, serasah mangrove (berupa daun, ranting dan biomassa lainnya) yang jatuh di perairan menjadi sumber pakan biota perairan dan unsur hara yang sangat menentukan produktivitas perikanan laut di depannya. Lebih jauh, hutan mangrove juga merupakan habitat (rumah) bagi berbagai jenis burung, reptil, mamalia dan jenis-jenis kehidupan lainnya, sehingga hutan mangrove menyediakan keanekaragaman (*biodiversity*) dan plasmanutfah (*geneticpool*) yang tinggi serta berfungsi sebagai sistem penunjang kehidupan. Dengan sistem perakaran dan kanopi yang rapat serta kokoh, hutan mangrove juga berfungsi sebagai pelindung daratan dan gempuran tsunami, angin topan, perembesan air laut ke daratan (Noor dkk,1999).

Fungsi hutan mangrove di Indonesia menurut (Saengger et al dalam Irwan, 2010:138) dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu fungsi fisik, fungsi biologi, dan fungsi ekonomi yang sangat potensial. Yang di jelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi Fisik yaitu:
 - a. Menjaga garis pantai agar tetap stabil.
 - b. Mempercepat perluasan lahan.

- c. Melindungi pantai dan terbing sungai.

2. Fungsi Biologi meliputi:

- a. Tempat benih-benih ikan, udang dan kerang-kerang dari lepas pantai.
- b. Tempat bersarang burung-burung besar.
- c. Sebagai habitat alami bagi banyak jenis biota.

Davis dan Natarina (2015) menjelaskan fungsi dan manfaat hutan, misalnya sebagai pelindung terhadap bencana alam. Dengan adanya vegetasi hutan mangrove dapat melindungi bangunan, tanaman pertanian atau vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam melalui proses filtrasi yang terjadi.

2.2 Aktor atau *Stakeholder*

2.2.1 Defenisi Aktor

Menurut (Rhenald Kasali,1994) *stakeholder* adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan.

Sedangkan *Grimble and Wellard* melihat *stakeholders* dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki. Dari definisi tersebut, maka *stakeholders* merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Jika berbicara mengenai *stakeholders* teori berarti membahas hal hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak (Azheri,2012).

Mengenai teori *stakeholder* adalah bahwa *stakeholder* merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholder* (Marzully Nur dan Denies Priantinah,2012).

Dapat disimpulkan dari berbagai pendapat ahli mengenai *stakeholder* bahwa, *stakeholder* merupakan individu ataupun kelompok yang memiliki sebuah kepentingan yang ada disebuah perusahaan atau di dalam program yang dimana keterlibatan *stakeholder* tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah perusahaan ataupun program. Dalam penelitian ini, analisis *stakeholder*

diperlukan untuk mengetahui peran masing-masing *stakeholder* yang merupakan semua aktor atau kelompok yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan dari sebuah tindakan

2.2.2 Stakeholder Internal dan Stakeholder Eksternal

Menurut (Ardianto,2008) aktor atau *stakeholder* terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu *Stakeholder* internal dan *Stakeholder* Eksternal.

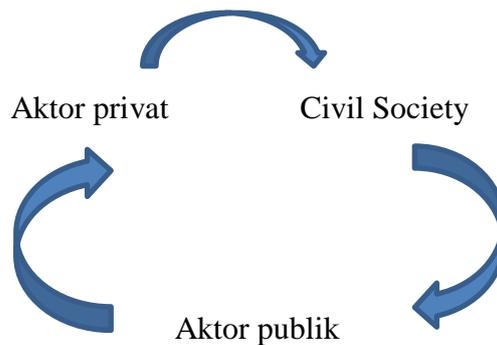
Stakeholder internal merupakan kelompok atau individu yang tidak secara tegas menjadi bagian lingkungan organisasi karena *stakeholder* internal adalah anggota dari organisasi, dimana para manajer memiliki tanggung jawab atas kepentingan mereka. Sedangkan *stakeholder* eksternal merupakan yang bukan merupakan bagian dari organisasi, namun mempengaruhi organisasi tersebut.

1. *Stakeholder* internal adalah publik yang berada didalam ruang lingkup perusahaan/organisasi. *Stakeholder* internal relatif mudah untuk dikendalikan dan pekerjaan untuk komunikasi intern bias diserahkan kepada bagian lain seperti bagian kepegawaian, atau dirangkap langsung oleh eksekutif puncak. Unsur-unsur *stakeholder* internal terdiri dari :
 - a. Pemegang saham : atau bias dibidang pemilik perusahaan yang mempunyai kekuasaan sangat besar.
 - b. Manajer dan Top Eksekutif : manajer berada dibawah kendali pemilik, hanya dengan kapasitas yang memadai seorang manajer dapat tampil secara otonom dalam mengelolah perusahaan.
 - c. Karyawan : orang-orang yang didalam perusahaan yang tidak memegang jabatan struktural.
 - d. Keluarga karyawan
2. *Stakeholder* eksternal adalah mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan, dan berada diluar perusahaan. Misalnya :
 - a. Konsumen : raja yang mempunyai hak untuk memilih barangnya sendiri konsumen sangat diperebutkan oleh banyak produsen
 - b. Pemerintah : penentu kebijakan, sedikit sekali produsen yang bias membujuk pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang menguntungkan baginya.
 - c. Penyalur : menyalurkan barang-barang yang dikehendaki konsumen.
 - d. Pers : media yang mana sangat berpengaruh pada masyarakat.

- e. Komunitas : masyarakat yang tinggal, hidup, dan berusaha di sekitar lokasi suatu perusahaan.

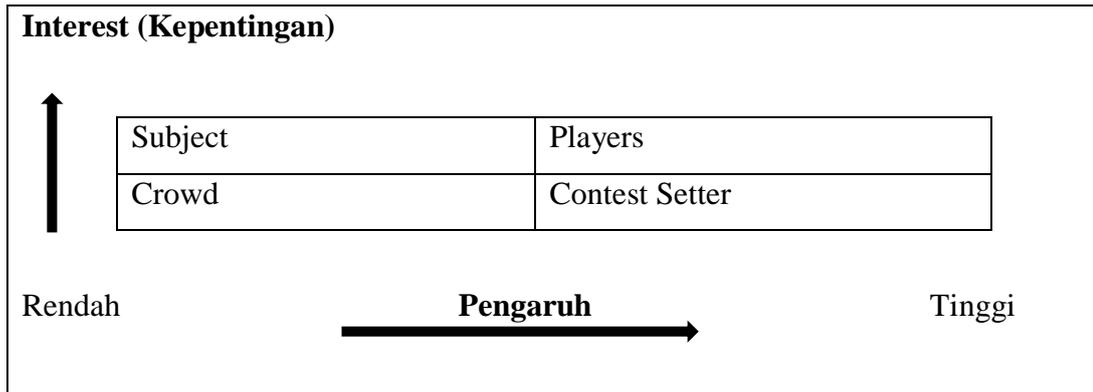
2.2.3 Aktor dalam formulasi kebijakan

Menurut Moore (dalam Anggara, 2014: 187), secara umum aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, yaitu aktor publik, aktor privat, dan aktor masyarakat (civil society). Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik. Hubungan ketiga aktor tersebut digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Anggara, 2014

Menurut Howlett dan Ramesh (dalam Anggara, 2014: 186), beberapa aktor atau organisasi yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan, antara lain eksekutif dan legislatif yang dihasilkan melalui pemilihan umum, pejabat atau birokrat yang diangkat, kelompok kepentingan, organisasi peneliti dan media massa. Selain hal tersebut, aspek lain yang berpengaruh dalam kebijakan publik antara lain bentuk organisasi negara, struktur birokrasi, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok bisnis.



Gambar 1. Matriks Analisis Stakholder menurut Brysson

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Contest setter* yaitu *stakeholder* yang berpengaruh tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan tetapi sedikit kepentingan. sehingga mereka memiliki resiko yang signifikan untuk harus dipantau dalam proses pelaksanaan kebijakan.
2. *Players* yaitu *stakeholder* yang aktif terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Stakeholder ini mempunyai kepentingan serta pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu program kebijakan.
3. *Subject* yaitu *stakeholder* yang memiliki kepentingan tinggi tetapi kekuasaan yang rendah. Walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Stakeholder ini dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan stakeholder lainnya.
4. *Crowd* yaitu *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang rendah dalam pelaksanaan kebijakan. Namun stakeholder ini memiliki pengaruh terhadap hasil yang di inginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Kepentingan dan pengaruh yang dimiliki akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dari pelaksana kebijakan.

2.2.4 Peran stakeholder

Peran *stakeholder* dapat di klasifikasi menjadi dua kelompok yaitu *Stakeholder* primer dan sekunder. *Stakeholder* primer adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap sumber daya, baik sebagai mata pencaharian ataupun terlibat langsung dalam eksploitasi. Sedangkan *stakeholder* sekunder adalah pihak yang memiliki minat atau kepentingan secara tidak langsung, atau pihak yang tergantung pada sebagian kekayaan atau bisnis yang dihasilkan oleh sumber daya (Wakka, 2014).

2.2.5 Governance

Leftwich dan Rhodes (dalam Eko & Dwipayana, 2003:8) mendefinisikan *governance* sebagai bentuk interaksi antara negara dan masyarakat sipil. *Governance* tidak sama dengan pemerintah yang berarti tindakan atau proses memerintah, interpretasi ini merujuk pada tindakan dan fungsi cabang-cabang eksekutif bagaimana pemerintahan bisa berjalan secara efektif. Aktor-aktor *good governance* menurut Sedarmayanti (2009: 280) antara lain:

1. Negara/pemerintah: pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Masyarakat: berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan swasta, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.
3. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal.

III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan November sampai Bulan Desember 2019 di lokasi pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

3.2 Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Kamera, merupakan hal yang digunakan sebagai alat penunjang untuk dokumentasi kegiatan pada saat berlangsungnya penelitian.
2. Perekam suara, merupakan alat yang digunakan pada saat wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi.
3. ATM, merupakan alat yang digunakan untuk mencatat hal – hal penting pada saat kegiatan penelitian berlangsung.
4. Pedoman wawancara, merupakan bahan yang digunakan untuk melakukan wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan pada saat penelitian berlangsung.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu :

1. Observasi merupakan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dilapangan (Nasution, 2011). Observasi dilakukan untuk mengetahui objek responden yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung yang dapat memberikan informasi.
2. Wawancara merupakan metode penelitian yang efektif untuk memverifikasi dan memvalidasi data (Sarwono, 2006). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap narasumber untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung.
3. Dokumentasi, yaitu pengambilan gambar pada berbagai objek untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendetail tentang topik/objek yang dibahas.

3.4 Tahap Pengambilan Data

Pada metode pengambilan data digunakan tiga tahap, yaitu:

1. Metode *Snowball Sampling* yang dimaksud dengan metode ini akan mengikuti rekomendasi responden untuk mencari data selanjutnya dan berhenti ketika tidak ada lagi informasi yang ditemukan (Nurdiani, 2014). Metode ini dilakukan pada saat wawancara untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung.
2. Triagulasi data yang dilakukan pada aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung pada pengambilan data sebelumnya.
3. Verifikasi data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah sistematis untuk meemeriksa isi kategori yang telah ada dalam teks dokumen kualitatif atau kuantitatif (Bhattacharjee, 2012; Bryman, 2012; Neuman, 2014).

3.5 Jenis Data

Data penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. data primer data yang diambil langsung dari lapangan melalui hasil wawancara dengan beberapa aktor, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari Kelurahan Bira dan beberapa sumber dari instansi/lembaga terkait sebagai data penunjang untuk melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara lapangan.

3.6 Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, teknik deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan hubungan yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat (Kusmayadi dan Sugiarto, 2000). Pengolahan data awal akan dilakukan dengan menggunakan hasil data yang diperoleh untuk mendapatkan analisis kepentingan dan peran para aktor terhadap pengelolaan hutan mangrove. Adapun tahap analisis data sebagai berikut:

1. Identifikasi aktor dan Perannya

Identifikasi aktor dilakukan untuk mengetahui atau menentukan siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung

2. Analisis Kepentingan para Aktor

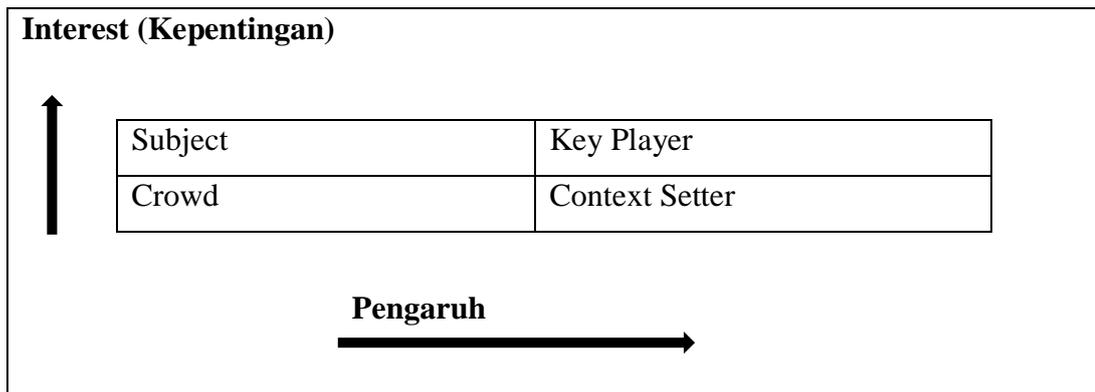
Analisis kepentingan dilakukan untuk mengetahui kepentingan setiap aktor dalam pengelolaan ekowisata Mangrove lantebung dengan melihat aspek kepentingan seperti, *Green Belt*, *Biodiversity*, pendidikan, kayu bakar, non kayu bakar dan wisata

3. Pemetaan kepentingan dan pengaruh setiap Aktor

Pemetaan nilai kepentingan dan penganruh para aktor diperoleh berdasarkan kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) aktor terhadap pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung, untuk mengetahui nilai kepentingan dan pengaruh menggunakan *software Microsoft excel* dengan mengklasifikasikan menjadi empat indikator penilaian sebagai berikut :

1. Sangat tinggi : 4
2. Tinggi : 3
3. Rendah : 2
4. Sangat Rendah : 1

Peran para aktor yang dipengaruhi oleh kepentingan dan pengaruhnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pemetaan Peranan Aktor dalam Pengelolaan hutan mangrove Lantebung

Keterangan :

Keyplayer : Kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi

Context Setter : kepentingan kecil, pengaruh tinggi, dan dapat menimbulkan resiko signifikan, sehingga harus dimonitor dan dikelola.

Subject : kepentingan tinggi, pengaruh kecil, supportif. Tidak punya kapasitas untuk mempengaruhi, tapi mampu untuk menggalang pengaruh.

Crowd : kepentingan kecil, pengaruh kecil, tidak perlu dipertimbangkan terlalu detail atau diikat/dilibatkan (masyarakat hanya objek)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

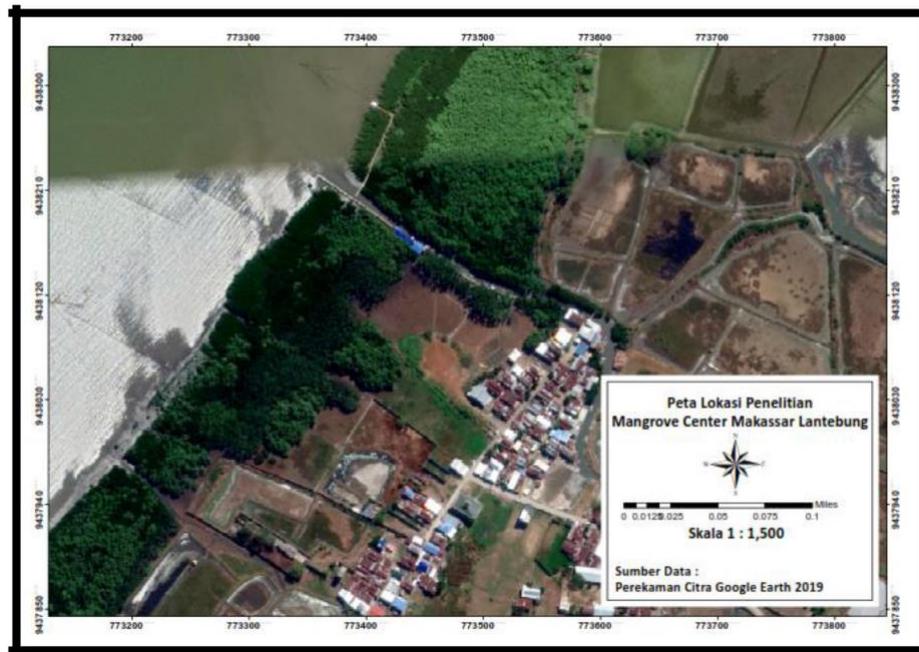
4.1 Keadaan Umum

4.1.1 Letak Geografis dan Administrasi Daerah

Ekosistem Mangrove Lantebung adalah salah satu objek wisata yang ada di kota Makassar tepatnya berada di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Kota Makassar merupakan daerah daratan yang dipengaruhi oleh ekosistem sungai, rawa dan laut. Kota Makassar berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene kepulauan disebelah Utara, Kabupaten Maros di sebelah Timur, Kabupaten Gowa dan Takalar di sebelah Selatan serta Selat Makassar di sebelah Barat.

Kecamatan Tamalanrea terdiri dari enam kelurahan dengan luas wilayah $31,86 \text{ km}^2$ yang terbagi di daerah pantai dan bukan pantai dengan topografi ketinggian antar permukaan laut. Adapun Empat Kelurahan daerah bukan pantai yaitu Kelurahan Tamalanrea Indah, Kelurahan Tamalantea Jaya, Kelurahan Tamalanrea dan Kelurahan Kapasa. Sedangkan daerah lainnya pantai yaitu Kelurahan Prangloe dan Kelurahan Bira.

Kelurahan Bira memiliki luas yaitu $19,28 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 11.684 jiwa. Kelurahan Bira yang secara administrasi berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah Barat sebagaimana lazimnya daerah pesisir, daerah ini beriklim tropis dengan karakter pantai yang landai dan cukup berlumpur, secara administrasi Kelurahan Bira dibatasi oleh wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Untia, sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Parangloe, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bulurokeng, dan sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar.



Gambar 3. Lokasi tempat penelitian

4.1.2 Keadaan Demografi

1. Komposisi Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu wilayah. Mereka menetap dan membangun kebudayaan sebagai hasil interaksi kehidupan sehari-hari. Masyarakat Kelurahan Bira tidak hanya terdiri dari satu suku saja. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah setempat menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Bira secara keseluruhan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar

No	Jenis kelamin	Jumlah penduduk(Jiwa)	Presentase(%)
1	Laki-laki	5.801	49,65%
2	Perempuan	5.883	50,35%
	Jumlah	11.684	100%

Sumber : Data Sekunder Kelurahan Bira 2019

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan 5.883 jiwa (50,35%) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki 5.801 jiwa (50,35%). Jadi total jumlah penduduk kelurahan Bira adalah 11.684 jiwa yang terdiri atas 2.737 kepala keluarga.

Mata pencaharian pokok masyarakat Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Berbeda-beda, terdiri dari petani, buruh tani, PNS, pengrajin industry rumah tangga, pedagang keliling, petrnak, Dokter, Bidan, Perawat, pembantu Rumah Tangga, Karyawan swasta, TNI dsq. Khusus untuk wilayah pesisir Kelurahan Bira pekerjaan Pokok masyarakatnya adalah nelayan, petambak, buruh dan tukang.

2. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat di Kelurahan Bira dipengaruhi oleh aspek karakteristik masyarakat yang umumnya berasal suku Makassar dan Bahasa keseharian mereka adalah Bahasa Makassar, serta pengaruh berada dalam ruang lingkup Kota Makassar sehingga informasi dapat dengan mudah di dapatkan dan mempengaruhi kegiatan sosial masyarakat. Budaya yang biasa masyarakat lakukan adalah budaya mayoritas suku Makassar.

4.2 Identifikitasi Aktor dan Perannya

Aktor dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki jaringan kekuasaan, serta memiliki kepentingan tertentu (Sahide, dkk., 2016). Aktor yang dimaksud adalah individu atau kelompok yang dapat mengakses langsung Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung. Aktor yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan Mangrove berasal dari berbagai kalangan, setiap aktor memiliki kepentingan dan tujuan yang tidak sama. Seperti halnya aktor yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung terdapat kelompok masyarakat dan instansi pemerintah.

Adapun aktor yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung Terdapat lima (5) aktor yaitu : lembaga jaringan Ekowisata Mangrove Lantebung (Jekomala), kelompok Nelayan Lantebung, Lurah Bira, Dinas Pariwisata Kota Makassar, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan

Tabel 2. Aktor pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung

Aktor	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Ekowisata Kelompok Mangrove Lantebung 	<p>Berperan langsung dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung seperti, melakukan pendampingan penanaman kepada pengunjung, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pelestarian mangrove</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok Nelayan Lantebung 	<p>Berperan dalam menjaga kelestarian mangrove</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lurah Bira 	<p>Berperan mengadakan rapat dengan masyarakat tentang keberlanjutan mangrove, memberikan izin administrasi kepada pengunjung yang ingin menanam, dan menjadi penghubung dengan dinas terkait atau donator yang ingin membantu pembangunan Ekowisata Mangrove Lantebung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata Kota Makassar 	<p>Telah menerbitkan SK untuk Jekomla, memberikan sosialisasi tentang wawasan wisata dan akan menjadikan salah satu ikon Kota Makassar</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan 	<p>Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Perda no.2 Tahun 2019 (RZWP3K).</p>
---	---

1. Jaringan Ekowisata Kelompok Mangrove Lantebung (Jekomala)

Kelompok Lembaga Jekomala merupakan lembaga yang berperan langsung dalam pengelolaan mangrove, lembaga tersebut dibentuk atas dasar inisiasi masyarakat bira untuk pelestarian dan pemanfaatan, yang dibentuk pada tahun 2016. Lembaga jekomala sebagai lembaga berbasis masyarakat. Kemudian lembaga jekomala sering mengikuti pelatihan yang diadakan dinas terkait, dan untuk peran langsung lembaga tersebut terhadap pengelolaan mangrove, dimana lembaga jekomala selalu melakukan pendampingan kepada masyarakat, kelompok atau intansi yang ingin mengadakan penanaman, serta terkhusus ketua lembaga jekomala sering melakukan pelatihan atau pemberian materi terhadap pengunjung maupun masyarakat tentang cara penanaman dan manfaat mangrove, lembaga jekomala juga berperan aktif dalam mensosialisasikan masyarakat Bira bagaimana pentingnya pelestarian dan pemanfaatan mangrove.

2. Kelompok Nelayan

Kelompok Nelayan Lantebung merupakan kelompok yang berada di Kelurahan Bira dan berada dibawah struktural jekomala, kelompok nelayan sering dilibatkan dalam forum rapat untuk membahas tentang pelestarian, dan pemanfaatan. Pelestarian yang dimaksud ialah bagaimana nelayan dapat menjaga serta mengawasi dalam artian tidak adanya masyarakat yang menebang pohon mangrove, karena seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya mangrove dan seringnya diadakan penanaman, hal ini meningkatkan pertumbuhan (*biodiversity*). Menurut nelayan setelah pelestarian dan pemanfaatan sering dilakukan, hal tersebut berdampak langsung terhadap pedapatan hasil tangkapan nelayan.

3.Lurah Bira

Pengelolaan yang dilakukan oleh Birokrasi Kelurahan Bira berupa melaksanakan musyawarah/ rapat tentang bagaimana pelestarian dan pemanfaatan mangrove, serta mempermudah akses administrasi seperti perizinan penanaman dan membantu intansi ataupun kelompok yang ingin melakukan penaman mangrove dengan memperlihatkan lokasi yang mesti ditanami. Birokrasi Kelurahan Bira juga menjadi aktor penghubung dengan dinas terkait dan donator yang ingin membantu peningkatan pembangunan yang ada di Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung.

4.Dinas Pariwisata

Pengelolaan yang dilakukan oleh dinas pariwisata ialah menjadikan Ekowisata Mangrove Lantebung menjadi salah satu ikon kota Makassar dan telah menerbitkan SK kelompok pariwisata serta telah melakukan sosialisasi wisata bersama masyarakat Bira tentang potensi mangrove, kemudian di tahun 2020 akan diadakan peningkatan SDM untuk pengelolaan ekowisata mangrove. Dinas pariwisata juga telah menyusun master plan yang berfokus pada pelestarian dan pembangunan sarana dan prasarana.

5.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar dalam pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung ialah mengawasi dan menjaga keberadaan zona hijau yang telah ditetapkan di kawasan ekosistem mangrove dengan menjalankan Perda No. 2 Tahun 2019 yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K) dan memberikan pembinaan atau penyampaian kepada masyarakat setempat untuk menjaga keberadaan jalur hijau yang ada di Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung.

4.2 Analisis Kepentingan di Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung

Kepentingan dari para aktor terhadap hutan mangrove ini dimulai dengan keberadaan jalur hijau yang tetap dipertahankan oleh setiap aktor, diiringi dengan *biodiversity*, kemudian kepentingan hutan mangrove sebagai sarana pendidikan bagi siswaswi setempat yang ingin mengenal hutan mangrove dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian. Kepentingan hutan mangrove lainnya juga terdapat dari kayu bakar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat begitu juga

dengan potensi hutan mangrove dari segi non kayunya, serta kepentingan hutan mangrove sebagai sarana wisata.

Hasil analisis kepentingan diringkas dan diperjelas ke dalam bentuk tabel, untuk memfokuskan hasil yang diperoleh mengenai area utama kepentingan dan aktor yang terkait pada setiap kepentingan, yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Aktor dan Kepentingan

Aktor	Kepentingan
Jekomala	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Hijau • <i>Biodiversity</i> • Pendidikan • Wisata
Kelompok Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Hijau • <i>Biodiversity</i> • Pendidikan
Lurah Bira	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Hijau • <i>Biodiversity</i> • Pendidikan • Wisata
Dinas Pariwisata Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Hijau • Pendidikan • Wisata
Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Hijau • <i>Biodiversity</i> • Pendidikan

1. Keberadaan Jalur Hijau

Jalur hijau adalah hutan yang didominasi oleh vegetasi bakau dan tumbuh pada kawasan pesisir pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik penting yang dibangun sejajar dengan pantai (Sriyana, 2005) jalur hijau ini merupakan kepentingan hutan mangrove yang memiliki manfaat dilihat dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Ketiga aspek ini merupakan aspek penting yang terdapat didalam jalur hijau. Aspek ekologi misalnya dengan sistem perakaran yang kokoh, ekosistem hutan mangrove mempunyai kemampuan meredam gelombang, menahan lumpur dan melindungi pantai dari abrasi, dan gelombang pasang (Rahmawaty, 2006).

Untuk hal ini semua aktor sepakat bahwa keberadaan jalur hijau yang ada di Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung sangat penting untuk keberadaan jalur hijau mesti dijaga keberadaanya, fungsi dari jalur hijau yang berada di hutan mangrove mulai dari sisi ekologi yang melestarikan keanekaragaman hayati dan menjadi salah satu sumber perekonomian serta jalur hijau melindungi kelurahan bira dari erosi air laut.

2. Kepentingan Keberadaan Keragaman Hayati (*Biodiversity*)

Jenis keragaman Hayati (*biodiversity*) dilihat dari komposisi, keragaman dan kepadatan. Pada keragaman hayati (*biodiversity*), aktor yang menganggap penting seperti kelompok nelayan, karena keberadaan keragaman sangat mempengaruhi hasil pendapatan nelayan. Aktor seperti ketua jekomala, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan dan Lurah Bira menganggap kehadiran keragaman hayati (*biodiversity*) juga dianggap penting karena ini mempengaruhi keberadaan organisme yang berada di bawah dan atas mangrove, aktor Dinas Pariwisata Kota Makassar menganggap rendah dikarenakan fokus dinas pariwisata lebih kepada pengembangan tempat wisata yang ada di Kawasan Ekowisata mangrove Lantebung.

3. Kepentingan Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan untuk kawasan hutan mangrove dianggap penting oleh semua aktor, namun kawasan hutan mangrove sampai saat ini belum populer

untuk dijadikan sebagai sarana pendidikan untuk semua kalangan, ini dibuktikan dengan hanya Mahasiswa dan kelompok tertentu yang sering melakukan penanaman mangrove di Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya fasilitas yang tersedia serta tidak terpenuhinya empat syarat yang ada. Aspek pendidikan hutan mangrove dikatakan layak dijadikan sebagai wisata pendidikan apabila (Wijayanti, 2009 dalam Mustika 2016):

- a. Mempunyai Lembaga, agar dapat berjalan dengan baik maka diperlukan seksi penelitian, pelatihan, informasi, ekowisata dan pendidikan lingkungan.
- b. Adanya jalan sebagai sarana mengelilingi mangrove.
- c. Tatanan mangrove tanpa merubah zonasi dari mangrove itu sendiri.
- d. Tidak adanya pedagang liar yang berada di kawasan wisata.

4. Kepentingan Wisata

Kepentingan sarana wisata dianggap sangat penting oleh aktor seperti Dinas Pariwisata, Jekomala dan Lurah Bira. Aktor Kelompok Nelayan Latebung dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan menganggap kurang penting dikarenakan, kelompok nelayan memiliki kepentingan terhadap pelesetarian yang berdampak langsung kepada hasil tangkapan nelayan sedangkan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan memiliki kepentingan pada bagaimana menjaga kelestarian di sekitar pesisir laut. Kepentingan sebagai sarana wisata sebaiknya memiliki aspek kunci berbasis masyarakat yaitu.

- a) Masyarakat membentuk panitia atau lembaga untuk pengelolaan kegiatan ekowisata di daerahnya, dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat.
- b) Prinsip *local ownership* (pengelolaan dan kepemilikan oleh masyarakat setempat) diterapkan sedapat mungkin terhadap sarana dan prasarana ekowisata, kawasan ekowisata.
- c) *Homestay* menjadi pilihan utama untuk sarana akomodasi di lokasi wisata.
- d) Pemandu adalah orang setempat (nilai partisipasi masyarakat).

- e) Perintisan, pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata menjadi tanggung jawab masyarakat setempat (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2009).

4.3 Pemetaan Para Aktor dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung

Pemetaan para aktor ini menjelaskan tentang bagaimana peran (pengaruh dan kepentingan) masing-masing aktor terhadap Ekowisata Mangrove Lantebung. Hasil pemetaan ini diperoleh dari hasil skoring setiap aktor terhadap aktor lain yang dilakukan saat wawancara bagaimana tingkat kepentingannya serta seberapa besar pengaruh setiap aktor yang dinilai terhadap keberadaan ekowisata mangrove. Hasil skoring yang didapatkan meliputi tingkat kepentingan dan pengaruh aktor terhadap keberadaan ekowisata mangrove yang disajikan pada tabel 3 dan table 4

Tabel 3. Nilai kepentingan dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung

Aktor	Nilai Kepentingan					Skor
	I	II	III	IV	V	
Jekomala	4	4	4	3	4	18
Kelompok Nelayan	2	4	1	4	1	11
Lurah Bira	3	2	3	4	3	9
Dinas Pariwisata Kota Makassar	3	3	4	3	3	16
Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan	4	2	2	3	2	9

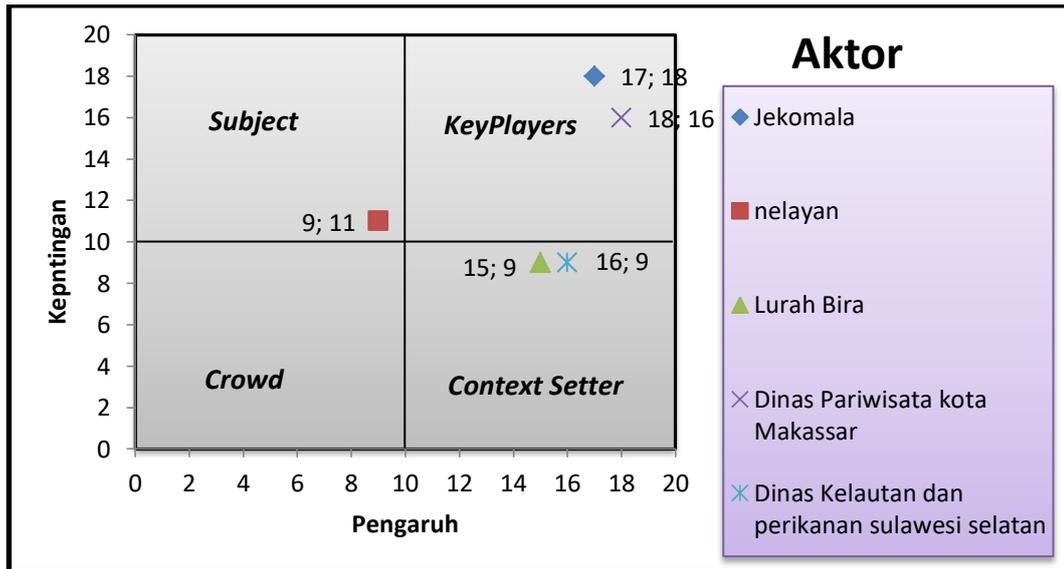
Keterangan : I : Keterlibatan, II : Manfaat, III = Persentasi Program Kerja, Tingkat Ketergantungan, dan V peran

Tabel 4. Nilai pengaruh dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung

Aktor	Nilai Pengaruh					Skor
	I	II	III	IV	V	
Jekomala	4	4	3	3	4	17
Kelompok Nelayan	2	1	2	2	3	9
Lurah Bira	2	2	1	1	3	15
Dinas Pariwisata Kota Makassar	2	3	4	4	3	18
Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan	3	2	3	3	3	16

Keterangan : I : Kondisi, II : Kelayakan, III : Kompensasi, IV Kepribadian dan V : Organisasi

Nilai skor pengaruh dan kepentingan yang telah diperoleh ini kemudian dipetakan kedalam bentuk pemetaan para aktor. Pada hasil pemetaan ini akan menjelaskan bagaimana posisi aktor atas perannya terhadap Ekowisata Mangrove Lantebung yang terbagi kedalam empat kuadran antara lain: *subject*, *keyplayers*, *crowd*, dan *context setter* yang dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pemetaan Pengaruh kepentingan setiap aktor dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung .

Peran para aktor dalam hal kepentingan dan pengaruhnya dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung dapat dilihat pada Gambar 4 di atas. Pada Gambar 4 ini diperoleh hasil pemetaan peran para aktor dan dapat dilihat bahwa masing masing aktor berada dikuadrannya masing-masing yaitu, *keyplayers*, *subject* dan *context setter*, sedangkan untuk *crowd* tidak terdapat pada aktor yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung

1. **Keyplayers**, adalah aktor yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung, dalam *Keyplayers* terdapat Jaringan Ekowisata Kelompok Mangrove Lantebung (Jekomala) dan Dinas Pariwisata Kota Makassar, hal tersebut dikarenakan kedua aktor tersebut terlibat langsung dalam pengelolaan dan memiliki peran penting dalam mengeluarkan regulasi atau melaksanakan program kerja untuk kepentingan Ekowisata Mangrove Lantebung.

2. **Context Setter** yaitu mempunyai pengaruh yang tinggi namun memiliki kepentingan yang rendah sehingga dapat menjadi risiko signifikan untuk dipantau, posisi ini diisi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan dan Lurah Bira, karena kedua aktor ini hanya berfokus pada regulasi dan pengawasan, regulasi yang dimaksud ialah proses administrasi untuk melakukan penanaman

atau kegiatan di Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung mesti seizin Lurah Bira agar kegiatan tersebut legal dan untuk hal pengawasan ialah Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan memastikan Perda No. 2 tahun 2019 tentang RZW3PK berjalan atau terlaksana sebagaimana mestinya.

3. **Subject** adalah para pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi namun memiliki pengaruh yang rendah, namun pemangku kepentingan ini dapat meningkatkan pengaruh apabila membentuk aliansi dan memungkinkan menjalin kerjasama dengan stakeholder yang lain, dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung yang menjadi *subject* yaitu kelompok nelayan, karena tidak memiliki pengaruh yang kuat, dikarenakan secara struktur Kelompok Nelayan Lantebung tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan regulasi atau memiliki power yang kuat untuk menentukan arah program yang akan dilaksanakan di Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung.

4. **Crowd** adalah aktor yang mempunyai kepentingan dan pengaruh yang rendah dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung, namun dari hasil yang didapatkan, tidak terdapat aktor yang berperan sebagai *crowd*. karena setiap aktor yang terlibat dalam pengelolaan di Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung telah memiliki tupoksi masing – masing sesuai dengan regulasi yang berlaku.

V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Aktor pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung Kelurahan Bira terdapat lima (5) aktor yaitu Jaringan Ekowisata Kelompok Mangrove Lantebung (Jekomala) Kelompok Nelayan Lantebung, Dinas Pariwisata Kota Makassar, Lurah Bira dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan.
2. Aktor yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung memiliki peran masing – masing, Jekomala memiliki peran mengelola langsung Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung, Kelompok Nelayan Lantebung menjaga kelestarian mangrove, Lurah bira berperan dalam proses administrasi bagi pengujung yang ingin melakukan menanaman serta menjadi narahubung antara dinas/lembaga yang ingin berkontribusi dalam pembangunan Ekowisata Mangrove Lantebung, Dinas Pariwisata aktif melakukan sosialisasi tentang pengelolaan tempat wisata yang tepat dan Dinas Kelautan dan Perikanan berperan menjaga kelestarian daerah pesisir laut.
3. Terdapat empat kepentingan di Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung yaitu keberadaan jalur hijau, *Biodiversity*, Pendidikan dan wisata, untuk jalur hijau semua aktor menganggap penting, kepentingan *Biodiversity*, dianggap penting oleh aktor Jekomala, Lurah Bira, Kelompok Nelayan, Dinas Kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan. Kepentingan wisata, dianggap penting oleh aktor Dinas Pariwisata Kota Makassar, Jekomala, Kelompok Nelayan Latebung dan Lurah Bira, dan kepentingan pendidikan dianggap penting oleh semua Aktor.
4. Pemetaan kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung dibagi menjadi 3 kuadran yaitu 1. *keyplayers* yang diisi oleh Jekomala dan Dinas Pariwisata Kota Makassar , 2. *Context Setter* yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 3. *Subjesct* adalah Lurah Bira dan kelompok nelayan.

5.2 Saran

- 1 Perlu adanya kolaborasi yang baik
- 2 Antara pemerintah atau dinas terkait dengan masyarakat dalam peningkatan pengelolaan Ekowisata Mangrove lantebung.
- 3 Dalam hal wisata sarana dan prasaranan mesti ditingkatkan guna menunjang aktivitas pengunjung yang ada di kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung.
- 4 Perlu peningkatan kawasan mangrove dijadikan menjadi sarana pendidikan bagi semua kalangan.
- 5 Perlu adanya hasil produk non kayu yang dibuat oleh masyarakat Bira agar menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakat.
- 6 Perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui perkembangan pengelolaan dari kawasan kowisata mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta,
- Azheri Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility; Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Badan Perencana Pembangunan Daerah (BPPD) Kota Makassar. 2015. Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2015 tentang rencana.
- Bando, A.R., Marsoedi, Susilo A., Tamsil A. 2017. *The strategy of mangrove forest management due to mitigation in north coastal area of Makassar. Resources and Environment*, 7(2), 31-39.
- Bryson, John M. 2004. *What Do When Stakeholders Matter : Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. Minneapolis: Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs.
- Campbell, A., & Brown, B. 2015. *Indonesia's vast mangroves are a treasure worth saving*. The Conversation. from
- Davis, C. dan Natarina. 2009. *Sains & Teknologi 2 : Berbagai Ide untuk Menjawab Tantangan dan Kebutuhan oleh Ristek* . Buku. Gramedia. Jakarta. 516p.
- Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. 2009. *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Buku. Direktorat Produk Pariwisata, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia. Jakarta. 9p.
- Elvinaro Ardianto. 2008 *public relation: pendekatan praktis untuk menjadi komunikator, orator, presenter dan juru kampanye yang handal*,
- FAO. 2007. *The world's mangroves 1980-2005*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

- Giri, C., Ochieng, E., Tieszen, L. L., Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., . Duke, N. 2011. *Status and distribution of mangrove forests of the world using earth*.
- Harahab, Nuddin. 2010. *Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove Dan Aplikasinya Dalam Perencanaan Wilayah Pesisir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Helpris Estaswara. 2010. *Stakeholder Relation*, (Jakarta ; Universitas Pancasila)
- Irwan, Zoeraini Djamal. 2010. *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kamahi, Umar, *Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan bagi Sosiologi Politik, Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1, Juni 2017 : 117 – 133
- Kathiresan, K. dan T. S. Thangam. 1990. *A note on the effects of salinity and pH on growth of Rhizophora seedlings*. Journal article Indian Forester. (116) 3: 243–244.
- Kasali Rhenald. 1994. *Manajemen Public Relation: konsep dan aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta ; pustaka utama graffiti).
- Khozin, Abdullah 2012. *Konsep Kekuasaan Michel Foucault*. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Volume 2, Nomor 1, Juni 2012.
- Krott, M. 2005. *Forest Policy Analysis. Book. Springer*. Netherland. 334p.
- Kustanti, A. 2011. *Manajemen Hutan Mangrove*. Buku. IPB Press. Bogor. 248p. .
Evolusi Hak Kepemilikan dan Penataan Peran Para Pihak pada Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dengan Kemunculan Tanah Timbul. Disertasi. Program Pascasarjana Ilmu Pengelolaan Hutan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 171p.
- Marzully Nur dan Denies Priantinah. 2004. “*Analisis Faktor-Fakor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility*” Jurnal Nominal, Vol I, No I, hlm.24.
- Mughis Mudhoffir, Abdil. 2013. *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik*. Jurnal Sosiologi Masyarakat Vol. 18, No. 1, Januari2013:75-100.
- Mustika, I.Y. 2016. *Kepentingan Dan Peran Aktor Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh*

Kabupaten Pesawaran. Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bandar Lampung.

- Nanang. 2014. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Noor, Y.R., Khazali, M. dan Suryadiputra, I. N. N. 1999. *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*. PKA/ WI-IP, Bogor.
- nugroho, R.. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Onrizal. 2008. *Panduan Pengenalan dan Analisis Vegetasi Hutan Mangrove*. Buku. Universitas Sumatera Utara. Medan. 19p
- tata ruang wilayah Kota Makassar tahun 2015-2034. Makassar: BPPD Kota Makassar.
- Sahide, M.A.K., Maryudi. A, Supratman, Giessen. L., 2016. *Is Indonesia untillising its international partners? The driving forces behind Forest management units*, Forest Policy and Economics.
- Thoha, M, *Kepemimpinan dalam Manajemen.Rajawali* , Jakarta, 1999.
- Wakka, Abd. Kadir. 2014. *Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Jurnal Balai Penelitian Kehutanan Makassar. Vol. 3,No.1: 47-55.
- Winarno, Budi.2004..*Teori dan Proses Kebijakan Publik*.PT. Media Pressindo, Jakarta.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran I Hasil Pengelolaan data

NO	Aktor	Nilai Kepentingan					skor
		I	II	III	IV	V	
1	Jekomala	4	4	3	3	4	18
2	nelayan	2	3	1	3	2	11
3	Lurah Bira	2	1	2	2	2	9
4	Dinas Pariwisata kota Makassar	3	3	4	3	3	16
5	Dinas Kelautan dan perikanan sulawesi selatan	2	1	2	2	2	9

No	Aktor	Nilai pengaruh					skor
		I	II	III	IV	V	
1	Jekomala	4	4	3	3	3	17
2	nelayan	2	2	1	2	2	9
3	Lurah Bira	3	3	2	3	4	15
4	Dinas Pariwisata kota Makassar	4	4	3	3	4	18
5	Dinas Kelautan dan perikanan sulawesi selatan	3	3	3	3	4	16

No.	Aktor	Kepentingan	Nilai Pengaruh
1	Jekomala	18	17
2	nelayan	11	9
3	Lurah Bira	9	15
4	Dinas Pariwisata kota Makassar	16	18
5	Dinas Kelautan dan perikanan sulawesi selatan	9	16

Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Gambar 5 Proses Wawancara dengan ketua Jekomala



Gambar 6 wawancara dengan Kelompok Nelayan



Gambar 7 Wawancara dengan Lurah Bira



Gambar 8 Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Makassar



Gambar 9 Wawancara dengan Dinas Keluatan dan Perikanan Kota Makassar

Lampiran 3

Pedomanan wawancara

Berikut lampiran daftar pertanyaan untuk Bapak/Ibu berkenaan dengan Tugas Akhir (Skripsi) terkait pengelolaan Mangrove di kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

Nama Pewawancara :

Waktu dan Tempat :

Nama Lengkap Informan :

Pekerjaan Informan :

Instansi

1. Sudah sejak kapan bapak/ibu bermukim di Kelurahan Bira?
2. Apakah bapak/ibu menggantungkan mata pencarian/memanfaatkan hasil dari hutan mangrove? Mis: tambak dll
3. Apakah bapak/ibu memiliki lahan di daerah hutan mangrove? Siapakah yang berwenang memberikan izin pemanfaatan?
4. Seberapa penting menurut bapak/ibu dengan adanya jalur hijau pada hutan mangrove? Beserta alasannya.
5. Seberapa penting menurut bapak/ibu dengan adanya jenis keragaman (*biodiversity*) pada hutan mangrove? Beserta alasannya
6. Seberapa penting menurut bapak/ibu dengan digunakannya hutan mangrove sebagai sarana pendidikan? Beserta alasannya
7. Seberapa penting menurut bapak/ibu dengan hutan mangrove sebagai pemenuhan kebutuhan kayu? Beserta alasannya
8. Seberapa penting menurut bapak/ibu dengan hasil produk non kayu pada hutan mangrove? Beserta alasannya
9. Seberapa penting menurut bapak/ibu dengan keberadaan hutan mangrove sebagai sarana wisata? Beserta alasannya
10. Apa saja peran bapak/ ibu dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove?
11. Adakah akses dukungan dari pihak luar yang mendampingi ataupun memfasilitasi pengelolaan hutan mangrove? Mis: LSM, dll

12. Apakah ada upaya pemerintah melibatkan masyarakat dalam memberikan izin pengelolaan hutan? Upaya seperti apa?
13. Siapa saja yang berperan dalam setiap pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan?
14. Siapa saja yang bisa memberikan informasi terkait pembangunan dan pengelolaan hutan mangrove? Informasi mengenai apa saja yang diperoleh?
15. Apa saja tugas dari instansi bapak/ibu terhadap keberadaan hutan mangrove?

